

Rekontruksi Mantra Pemberdayaan: Memikirkan Ulang Model KKN UIN Sunan Kalijaga

Pajar Hatma Indra Jaya

Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

Email: pajar.jaya@uin-suka.ac.id

Abstrak. Penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat merupakan tiga kegiatan yang diamanahkan negara kepada perguruan tinggi. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu wujud dari tugas pengabdian masyarakat. Di masa lalu KKN dinanti-nanti masyarakat, namun saat ini mulai terasa tanda-tanda bahwa yang membutuhkan KKN bukan lagi masyarakat, namun mahasiswa. Untuk itu diperlukan pemikiran ulang (dekonstruksi) guna membangun model KKN yang lebih tepat. Untuk merumuskan model KKN ini dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KKN melalui kajian dokumen laporan KKN, Focus Group Discussion, serta wawancara kepada mahasiswa pasca KKN. Studi ini menemukan ada beberapa prinsip yang harus dirubah dari KKN UIN Sunan Kalijaga, mulai dari penentuan tujuan, lokasi, sampai metode KKN.

Kata kunci: pengabdian masyarakat, model KKN, dekonstruksi

A. Pendahuluan

Model KKN Bukan Mantra Yang Tabu Untuk Dirubah

Hampir semua perguruan tinggi mempunyai mekanisme Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai manifest dari program pengabdian masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai manifest KKN muncul pada tahun 1971 yang dicetuskan oleh Prof. Koesnadi Hardjosoemantri, SH. Pada bulan Februari 1972 kegiatan tersebut kemudian dicanangkan oleh Presiden sebagai kegiatan bagi mahasiswa di seluruh Indonesia dan mulai dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum (Abror, dkk, 2010; 2, 4). Dalam perkembangannya KKN menjadi mata kuliah wajib di semua perguruan tinggi sampai era reformasi, setelah itu tetap digunakan, kecuali beberapa perguruan tinggi. Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 1998 menghentikan kegiatan KKN dan kemudian memosisikannya sebagai mata kuliah pilihan. Dengan kegiatan KKN diharapkan perguruan tinggi tidak menjadi menara gading yang aktivitasnya terpisah dengan persoalan masyarakat.

Program KKN telah menorehkan banyak manfaat bagi masyarakat. Di masa lalu, KKN benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai agen pembangunan, peserta KKN ikut mensosialisasikan program pemerintah, turut mengajar dan kerja bakti di masyarakat. Pada masa itu jumlah mahasiswa di Indonesia masih sangat sedikit sehingga didatangi peserta KKN terasa didatangi orang yang spesial. Lebih jelas tentang sejarah dan peran KKN dalam pembangunan dapat dilihat dari tulisan Syahrial Wahab (1974) “*Kuliah Kerja Nyata dan Perubahan Sosial*” dan Margono Slamet (1986), “*Peranan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Dalam Pembangunan Pedesaan dan Perubahan Sosial*”. Di era ini beberapa Program KKN juga masih menginspirasi dan menjadi pengungkit perkembangan desa-desa wisata di beberapa daerah, seperti di Gua Pindul yang awalnya didampingi mahasiswa KKN UGM (<http://www.pindul.net/2015/08/sejarah-dan-asal-usul-go-pindul.html>, diunggah 14 Januari 2016).

UIN Sunan Kalijaga juga telah melakukan KKN sejak tahun akademik 1976/1977 dan menjadi kegiatan wajib sejak tahun 1980 (Indal Abror, dkk, 2010; 4). Ada banyak hal yang telah dilakukan oleh KKN UIN Sunan Kalijaga, terutama pada aspek keagamaan. Meskipun demikian belum ada satu kepuasan ataupun hasil yang monumental terkait dampak KKN di UIN Sunan Kalijaga. Dengan demikian dibutuhkan satu rekonstruksi model, yaitu pembacaan ulang (dekonstruksi) dan reformulasi untuk menemukan model KKN di UIN Sunan Kalijaga sehingga KKN semakin bermanfaat.

Kritikan-kritikan terhadap Program KKN sudah mulai bermunculan, mulai dari tulisan sampai penolakan KKN di beberapa tempat. Beberapa tulisan menyoroti bahwa KKN tidak memberdayakan masyarakat, bahkan membuat masyarakat mengalami ketergantungan. Program-program KKN kehadirannya seringkali menjadi rutinitas yang tidak jarang dimanfaatkan secara negatif oleh masyarakat, bahkan kehadirannya mendorong masyarakat menjadi kanak-kanak yang menunggu kedatangan *sang Sinterklas* lengkap dengan beragam hadiahnya (Saptoni, 2006; 9). Lihat juga ulasan LPM Arena, *KKN Posdaya 2014: Beginning of the End*. Beberapa desa menerima KKN dengan syarat mahasiswa tidak memasak sendiri dan membayar uang makan dengan besaran tertentu.

Model KKN harus terus dipikirkan ulang. Program-programnya tidak boleh diposisikan sebagai mantra sakral yang dirapalkan dalam situasi apapun. Model KKN UIN Sunan Kalijaga sudah tertuang dalam *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta* yang kemudian direvisi menjadi *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya*. Di dalamnya sudah ada ketentuan, mulai dari tujuan KKN sampai bagaimana membuat laporan KKN. Meskipun demikian beberapa ketentuan tidak ditulis secara tersurat, namun seakan-akan sudah menjadi konvensi yang tidak pernah dilihat ulang. Sejak dahulu kala program KKN identik dengan program membuat plang jalan, mengecat, dan mengajar TPA, bahkan hal itu masih terjadi ketika model KKN di UIN Sunan Kalijaga sudah menjadi KKN Posdaya berbasis masjid. Agar KKN UIN Sunan Kalijaga dapat menghasilkan perubahan-perubahan positif di masyarakat maka modelnya perlu untuk terus menerus dievaluasi.

Tulisan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan menemukan model KKN yang bisa memberdayakan masyarakat secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Untuk mendapatkan rumusan akan model KKN dilakukan pengumpulan data dan evaluasi terhadap pelaksanaan KKN, dengan cara melakukan kajian terhadap dokumen laporan KKN, buku pedoman KKN, *Focus Group Discussion* dosen dengan Pendamping Lapangan (DPL) KKN pada tahun 2015, serta wawancara kepada 24 mahasiswa pasca menjalani KKN di UIN Sunan Kalijaga.

B. Pilihan Tempat

Seberapa Banyak Masalah atau Seberapa Banyak Potensi

Salah satu langkah penting dalam menentukan keberhasilan sebuah program kuliah kerja nyata adalah penentuan lokasi. Ada beragam model untuk menentukan lokasi KKN dengan konsekuensi-konsekuensi yang mengikutinya. Beberapa perguruan tinggi memilih lokasi berdasarkan pada seberapa besar masalah yang dihadapi komunitas, namun beberapa lembaga menentukan lokasi berdasarkan pada seberapa banyak potensi yang dimiliki masyarakat sehingga program KKN dengan mudah dan cepat menjadi pengungkit pembangunan.

UIN Sunan Kalijaga selama ini cenderung lebih banyak mengambil pendekatan pertama, sehingga terkesan semakin banyak masalah yang dihadapi calon lokasi KKN maka daerah itu semakin menarik bagi UIN Sunan Kalijaga. Sebagai konsekuensinya, lokasi KKN UIN Sunan Kalijaga selalu lokasi yang jaraknya jauh dari kota, sepi, kurang persediaan air, jauh dari pasar, jauh dari keramaian, sedikit penerangan jalan, secara ekonomi kurang, dan fasilitas publik yang terbatas. Semakin tidak ada air dan sinyal telekomunikasi maka lokasi tersebut dirasa semakin tepat.

Mahasiswa yang datang ke lokasi harus beradaptasi dan merasakan keserbaterbatasan itu. Salah satu tujuan dari penentuan lokasi ini adalah agar mahasiswa dapat merasakan keterbatasan sehingga ketika sudah berkarier ia tidak akan melupakan kondisi masyarakat dan selalu peduli terhadapnya. Tujuan ini berhasil karena banyak mahasiswa yang rindu untuk bernostalgia merasakan sensasi suasana KKN ketika sudah lulus kuliah (Goegoex, 29 September 2014). Meskipun sebagai catatan, banyak mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah sehingga mereka sudah cukup merasakan kondisi tersebut tanpa harus KKN.

Sebagai konsekuensi dari pilihan model pertama maka dibutuhkan sumber daya yang jauh lebih banyak untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Jika yang dilihat adalah masalah yang berat dan banyak maka sebenarnya mahasiswa akan kesulitan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Bahkan dengan energy yang besar, perubahannya belum tentu nampak sehingga KKN UIN Sunan Kalijaga tidak populer.

Model kedua, memilih lokasi KKN berdasarkan potensi yang ada. Pilihan lokasi bukan berdasarkan seberapa menderitanya masyarakat, namun seberapa besar peluang mahasiswa dan perguruan tinggi dapat turut melakukan peningkatan dan pengembangan potensi yang ada. Semakin banyak potensi yang nampak maka peluang keberhasilan program dan kepopuleran perguruan tinggi akan semakin besar.

C. Pilihan Tempat

Seberapa Jauh KKN Dari Kampus

Program KKN UIN Sunan Kalijaga selama ini dilakukan di daerah-daerah yang cukup jauh dari kampus UIN Sunan Kalijaga. Sebagian besar KKN dilakukan di lokasi yang berjarak tidak kurang dari 20 km dari kampus, meskipun masih berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jauhnya lokasi akan memaksa mahasiswa menginap dan belajar membaur dengan masyarakat. Hal tersebut dirasa merupakan salah satu tujuan KKN.

Sebenarnya Program KKN tidak harus dipatok dengan jarak yang jauh. Hal ini karena banyak masalah dan potensi yang ada dan dihadapi masyarakat di sekitar kampus. Misalnya, di kampung-kampung sepanjang Sungai Gajah Wong yang merupakan lokasi dimana UIN Sunan Kalijaga berada masih terdapat banyak pemukiman kumuh, kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, dan perilaku sakit masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan. Jangan sampai UIN Sunan Kalijaga melakukan KKN di lokasi-lokasi yang sangat jauh, namun didekat kampus UIN Sunan Kalijaga malah dijadikan lokasi KKN oleh kampus-kampus lain. Hal ini telah terjadi, dimana UNY, UAD, dan beberapa kampus yang lain telah melakukan KKN di masyarakat sekitar Sungai Gajah Wong.

Jika KKN dianggap sebagai bentuk tanggung jawab perguruan tinggi kepada masyarakat/CSR maka dalam strategi CSR biasanya dibagi ke dalam *ring* (lingkaran). Semakin dekat kawasan terhadap perusahaan itu berdiri maka semakin besar tanggungjawab pembangunan dibebankan masyarakat ke perusahaan. Di banyak perusahaan hal ini juga nampak dari dana yang diberikan, semakin dekat dusun/kelompok dampingan dengan perusahaan maka semakin besar dana diberikan. Dengan logika tersebut maka KKN UIN Sunan Kalijaga seharusnya menyasar terlebih dahulu masyarakat sekitar kampus, minimal tidak meninggalkan mereka. Model penentuan lokasi CSR ini seperti lampu pijar, semakin dekat dengan lampu/perusahaan maka semakin banyak program diberikan. Lebih lanjut baca tulisan Pajar Hatma Indra Jaya (2011; 101) dan Harry Nuriman (2013; 4, 49).

Perlu dipahami juga bahwa KKN merupakan mata kuliah yang hanya mempunyai beban 4 sks sehingga (sebenarnya) pelaksanaan KKN tidak harus menginap di lokasi. Hal ini pernah terjadi ketika KKN UIN Sunan Kalijaga diminta membantu program biopori Pemerintah Kota Yogyakarta. KKN saat ini menjadi mata kuliah yang dasyat karena dengan 4 SKS, Program KKN mempunyai tujuan yang

banyak, mulai dari kompetensi membaaur sampai membuat program. Namun demikian kompetensi membaaur sebenarnya tidak harus diperoleh dengan jalan menginap.

Di Bangladesh kita mendengar bagaimana keberhasilan program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Muhammad Yunus dan mahasiswanya. Kegiatan tersebut dimulai dari masyarakat sekitar kampus (Universitas Chittagong) dan tidak perlu jauh-jauh menginap. Dari pendampingan masyarakat di sekitar kampus terhadap 42 orang dengan dana 27 dolar ini munculah model simpan pinjam yang dinamakan Grameen Bank. Grameen Bank kemudian berkembang melayani 73.000 desa di Bangladesh dan meluas ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Keberhasilan program ini kemudian membawa Yunus mendapatkan nobel perdamaian pada tahun 2006 (Muhammad Yunus, 2007).

D. Pilihan Langkah Pemberdayaan

KKN Selalu mulai Dari Awal

Salah satu pendekatan berbasis potensi yang paling dikenal adalah teori ABCD (*Asset Based Community Development*) dari John Kretzmann dan John L. McKnight. Dalam teori *Asset Based Community Development* dikenal lima tahapan pemberdayaan yang sering disebut sebagai 5D, yaitu *discovery, dream, design, define, dan destiny* (Melia dan Ahmad, 2008; vi, vii) Pendekatan ini juga dikenal sebagai *Strength-Based Approach (SBA)* atau *4D cycle in action/appreciative* yang diperkenalkan oleh David Cooperider. Pada awalnya hanya dikenal 4 tahap, yaitu *discovery, dream, design, dan destiny* (Cooperider and Whitney, 2005; 5, 15, 16).

Langkah pertama adalah *discovery*. *Discovery* adalah menemukan potensi yang ada di masyarakat. Langkah menemukan potensi merupakan langkah yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat. Langkah ini lebih mudah dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan orang luar daripada masyarakat sendiri. Orang luar merupakan orang yang berasal dari lokasi yang berbeda sehingga ia mempunyai sensitifitas, ketertarikan, dan kritis terhadap kondisi yang baru dilihatnya. Sedangkan masyarakat asli biasanya kurang perhatian terhadap potensi yang ia miliki karena menganggap yang ada merupakan hal yang telah biasa ia saksikan-sudah *taken for granted*. Dalam tahap ini mahasiswa dapat mengumpulkan dan memaparkan ke masyarakat tentang berbagai potensi yang dapat diolah dalam kerja pemberdayaan masyarakat selanjutnya (Ketzmann and McKnight, 1993; 6).

Untuk menemukan asset yang ada di satu masyarakat, seorang pengembang masyarakat (mahasiswa) dapat memeriksa adakah tujuh macam asset di masyarakat. Menurut Gary Paul Green dan Anna Haines (2012) dalam *Asset Building and Community Development*, tujuh macam asset/modal yaitu modal fisik (*physical capital*), modal finansial (*finansial capital*), modal lingkungan (*environmental capital*), modal politik (*political capital*), modal manusia (*human capital*), modal sosial (*social capital*), dan modal budaya-agama (*cultural-spiritual capital*) (Green and Haines, 2012:117-255).

Langkah kedua adalah *dream* atau membangun mimpi. Dari potensi yang ada maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi jika potensi ini dapat dikembangkan. Dalam membangun mimpi perlu melibatkan masyarakat karena merekalah yang akan melakukan kerja-kerja pemberdayaan. Hal ini sesuai konsep pemberdayaan, yaitu *helping people to help themselves* (kemandirian). Meskipun demikian mahasiswa hendaknya terlibat dalam proses membangun mimpi. Keterlibatan mahasiswa diantaranya adalah menjadi pengungkit agar mimpi masyarakat bisa tumbuh. Salah satu cara yang paling mudah adalah lewat *imitasi-copycate*-mantra ATM. ATM kepanjangan dari amati, tiru, dan modifikasi. Mahasiswa bisa memberi gambaran pemanfaatan potensi-potensi yang ada dari pengalaman daerah lain, hal ini bisa dilakukan dengan studi banding langsung ataupun sekedar lewat film. Dari proses ini diharapkan muncul mimpi yang sama di semua kelompok dampingan.

Langkah ketiga adalah *design*, yaitu membuat desain atau perencanaan untuk mewujudkan mimpi. Perencanaan ini dapat dibuat tahap demi tahap, dari jangka pendek yang dilakukan dalam setahun sampai

perencanaan jangka panjang. Setelah itu dilanjutkan *tahap keempat* yaitu *define*. *Define* dapat diartikan menentukan pembagian kerja, siapa melakukan apa dan bentuknya bagaimana. Setelah perencanaan dilakukan maka *langkah kelima*/terakhir adalah *destiny* yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan tahap terakhir dari siklus pertama, jika dari siklus pertama belum dicapai mimpinya maka bisa dilanjutkan dengan tahap awal siklus kedua.

Pelaksanaan KKN seringkali tidak dilakukan secara sistematis dan selalu memulai langkah dari awal lagi. Hampir selalu, ketika satu kelompok KKN terjun ke suatu lokasi maka langkah pertama yang dilakukan adalah mencari masalah atau potensi terlebih dahulu. Pertanyaannya: kenapa tidak memulai KKN dari langkah yang sudah dilakukan masyarakat (melanjutkan pekerjaan masyarakat) atau menggunakan data (masalah dan potensi) yang sudah dimiliki masyarakat atau melanjutkan langkah yang telah dimulai oleh kelompok KKN pada priode sebelumnya? Jika hal itu dilakukan maka KKN akan kelihatan berkesinambungan. Hal ini akan semakin sistematis jika LP2M menyediakan *data base* program yang lalu atau *data base* potensi dan masalah yang sudah terpetakan pada tahun-tahun sebelumnya.

E. Pilihan Tujuan KKN

Antara Berpartisipasi Dalam Menyelesaikan Masalah Masyarakat Atau Aplikasi Keilmuan Prodi

Ada tujuh tujuan KKN yang dirumuskan UIN Sunan Kalijaga, dari tujuh tujuan yang digariskan terlihat tujuan besarnya cenderung untuk membantu pemerintah melakukan pembangunan atau menyelesaikan masalah masyarakat (Abror, dkk, 2010; 15, 16; Maksudin, 2012). Aplikasi keilmuan bukan menjadi tujuan utama, namun sekedar sebagai alat untuk menyelesaikan masalah sehingga hal itu tidak tercantum secara tersurat dalam buku panduan KKN.

Jika dilihat konsep idealnya dan dihubung-hubungkan memang aplikasi keilmuan otomatis akan mampu membantu pemerintah dalam pembangunan. Namun dalam aplikasinya kedua tujuan tersebut merupakan dua pilihan yang jauh terpisah dengan konsekuensi pendekatan yang berbeda. Apalagi KKN hanya dilakukan dalam waktu yang singkat.

Jika membantu menyelesaikan masalah masyarakat maka mahasiswa dituntut untuk menemukan masalah tersebut dan kemudian menyusunnya dalam program kerja. Hal ini bisa dilakukan ketika mahasiswa tidak memposisikan dirinya berperan secara teknis sebagai *problem solver* sendiri, namun mahasiswa hanya dituntut sebagai *enabler*, yaitu orang yang berfungsi sebagai pemungkin terkait kebutuhan masyarakat. Ia bisa hanya bertindak sebagai penghubung-broker antara kebutuhan masyarakat dengan pemerintah daerah sebagai instansi teknis yang paling punya sumber daya dan memang berkewajiban untuk menyelesaikan masalah masyarakat (Tiyanto, dkk, 2006; 128, 129). Jikalau pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan persoalan itu maka ia bisa menghubungkan dengan dunia akademik yang punya keahlian tersebut. Jika mahasiswa difungsikan sebagai *enabler* maka ia harusnya tidak terlalu dituntut untuk mempunyai program kerja yang sesuai dengan jurusannya. Dalam praktiknya sampai saat ini program kerja sesuai dengan keilmuan menjadi program kerja utama.

Jika KKN menitikberatkan pada aplikasi keilmuan maka menyelesaikan masalah masyarakat tidak terlalu penting. Ia tidak perlu dituntut melakukan *assessment* kebutuhan masyarakat secara umum. Namun cukup melihat kondisi-kondisi dimana keilmuannya bisa dipraktikkan di masyarakat. Sehingga *assessment* masalah tidak perlu dilakukan atau minimal tidak perlu mendapat porsi waktu yang terlalu lama (*rapid appraisal*). Dua pilihan tersebut akan berdampak pada apakah program perlu pendekatan *top down* atau *bottom up*.

F. Pilihan Paradigma

Top Down atau Bottom Up

Secara umum ada dua model pembangunan, yaitu model yang *top down* dan *bottom up*. Model *top down* adalah model dari atas ke bawah, maksudnya orang yang merencanakan program adalah orang luar dan ketika membuat perencanaan tidak perlu melibatkan masyarakat. Model ini berasumsi bahwa orang luar/pengelola program adalah orang yang ahli. Model *top down* ini banyak dilakukan dalam pembangunan di masa Orde Baru.

Situasi model pembangunan *top down* menuntut munculnya teknokrat untuk bereksperimen dan menerapkan pengetahuan teoritisnya di kampus untuk dipraktikkan dan melakukan transformasi di masyarakat. Orang luar diposisikan sebagai subyek pembangunan dan masyarakat adalah obyeknya. Model ini muncul karena proses pembangunan membutuhkan waktu yang cepat. Bentuk dari model ini adalah pendekatan *Rapid Rural Appraisal*/penilaian desa secara cepat. Biasanya pengembang masyarakat dikirim untuk survey sebentar di lokasi, setelah itu ia akan kembali merumuskan kebutuhan dan program untuk masyarakat. Sedangkan model *bottom up* adalah model pembangunan dari bawah yang menghendaki partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan sampai evaluasinya. Model ini digagas oleh Robert Chambers dan dikembangkan Rajesh Tandon yang menghasilkan konsep PRA/*Partisipasi Rural Appraisal* sampai model PAR (*Partisipasi Action Research*). Model ini secara umum cenderung memerlukan waktu yang lebih lama karena perlu proses pembauran dan bisa jadi penyadaran ke sebagian masyarakat (Chambers, 1987; Chambers, 1996; Jaya, 2012).

Kedua pendekatan ini sama baiknya, mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Meskipun sejak reformasi dan dalam perkembangan sampai saat ini pendekatan *bottom up* dianggap lebih baik daripada pendekatan yang *top down* karena pendekatan *top down* cenderung bias orang luar. Namun untuk sebuah program pemberdayaan masyarakat yang hanya dilakukan dalam waktu singkat, satu atau dua bulan, maka pendekatan *top down* tidak boleh dinafikan. Apalagi mahasiswa yang datang ke masyarakat merupakan orang-orang muda didikan universitas yang mempunyai teori-teori canggih (baru) yang perlu diaplikasikan di masyarakat.

Salah satu syarat pendekatan *top down* adalah perencanaan program harus benar-benar matang untuk dilakukan selama satu atau dua bulan. Program tersebut harus realistis bisa dikerjakan dalam waktu singkat dan pragmatis yang artinya dibutuhkan masyarakat. Model pendekatan *top down* lebih banyak dikaitkan dengan ideology pembangunan, sedangkan pendekatan *bottom up* identik dengan istilah pemberdayaan.

Meskipun paradigm yang terakhir dikembangkan adalah paradigm pemberdayaan, namun dalam praktiknya meskipun masyarakat sudah terkena gelombang reformasi yang menghendaki partisipasi masyarakat, namun ketika mahasiswa akan melakukan KKN masyarakat selalu bertanya apa programnya-masyarakat ikut program mahasiswa? Padahal mahasiswa belum melakukan *assessment* masalah dan potensi lingkungan dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa dalam pengetahuan masyarakat sebenarnya masih terngiang-ngiang pendekatan *top down*. Pendekatan *bottom up* lebih menekankan pelibatan, pengikutsertaan dan penumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. Pendekatan ini bisa dikatakan oleh rakyat dan untuk rakyat, mulai dari gagasan, pelaksanaan, dan evaluasinya melibatkan masyarakat. Salah satu kelemahan model ini adalah waktu yang dibutuhkan jauh lebih lama dari model yang pertama. Berdasarkan alasan waktu KKN yang cepat maka tidak ada salahnya jika KKN dilakukan dengan model *top down*.

G. Pilihan Soal Target

Sustainable atau Selalu Mulai Dari Awal

Dalam KKN sekarang ini mahasiswa diminta untuk membuat program kerja kelompok dan program kerja individu. Dilihat dari jumlahnya program kerja tersebut cukup banyak, setiap kelompok mempunyai satu program kerja kelompok dan masing-masing orang wajib membuat empat program (pedoman baru)/satu program (pedoman lama). Program individu yang banyak dalam waktu yang singkat ini juga akan mengabaikan model KKN yang merupakan kerja interdisipliner (integrasi-interkoneksi) studi. Mahasiswa bisa terjebak pada program individu yang tidak terintegrasi dan interkoneksi antar disiplin ilmu. Dengan demikian hipotesis tulisan ini berasumsikan bahwa program individu yang banyak membuat tidak ada sinergi diantara anggota kelompok.

Harusnya dibuat satu program kerja yang dalam program kerja tersebut didukung oleh berbagai disiplin (sinergi) gagasan bersama dan dilakukan bersama oleh semua anggota kelompok. Misalkan program pemberdayaan ekonomi lokal, maka ada mahasiswa yang mendampingi dari segi konten-pelatihan, dari segi pemasaran produk, pengemasan, dan juga dari segi pelabelan sehat/halal.

Sebenarnya program-program KKN UIN Sunan Kalijaga banyak yang tercapai, namun beberapa program tercapai selama mahasiswa ada di lokasi. Sering sekali program-program yang dibuat musnah tanpa bekas setelah tiga bulan ditinggalkan mahasiswa. Ketika dilakukan evaluasi/panitia datang kembali maka yang masih ada hanya program-program yang bersifat fisik, seperti plangisasi jalan ataupun adanya lampu-lampu penerangan. Sedangkan program pelatihan ekonomi, kegiatan taman pendidikan Al-Qur'an, kursus pelajaran bagi anak-anak sudah tidak berjalan lagi. Ini menunjukkan bahwa program-program yang ada tidak menunjukkan adanya kesinambungan atau *sustainable*.

Menurut penulis, dalam waktu KKN yang hanya satu atau dua bulan, mahasiswa tidak perlu diberi target yang banyak, satu program kelompok dan satu program individu asalkan itu bisa berlanjut lebih baik daripada program yang banyak namun tidak ada kelanjutannya. Ketidakberlanjutan program setelah mahasiswa pergi dan tidak dilanjutkan oleh masyarakat kembali juga menunjukkan bahwa kegiatan KKN belum mampu melibatkan, mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan/program yang dilakukan mahasiswa. Dibutuhkan perhatian agar peserta KKN mampu menghasilkan kader/pendamping organik, yaitu kader yang berasal dari masyarakat lokal yang punya kapasitas dan kemampuan untuk melanjutkan program pengabdian masyarakat sehingga program KKN berkelanjutan.

H. Kesimpulan

KKN merupakan mata kuliah yang sangat penting sebagai bentuk uji coba sehingga seorang mahasiswa bisa menjadi intelektual organik, yaitu seorang akademisi yang punya kemampuan teoritis sekaligus mampu bekerja bersama masyarakat. Saking pentingnya program KKN maka model KKN tidak boleh mengalami stagnasi seolah-olah sebagai mantra yang tidak bisa dirubah. Melakukan dekonstruksi, membaca, dan menyusunnya berulang-ulang harus dilakukan agar KKN UIN Sunan Kalijaga tidak menjadi formalitas *ceremonial*. Perlu ada banyak eksperimen untuk menemukan formula yang tepat, baik dari segi waktu sampai model pelaksanaannya. Model KKN selama ini belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Indal (ed.), *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Yogyakarta: LPM UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Chambers, Robert, *“Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang”*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial/LP3ES, 1987.
- Chambers, Robert, *Participatory Rural Appraisal: Memahami Desa secara Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius, 1996.
- Cooperider, David and Whitney, Diana, *Appreciative Inquiry: A Positive Revolution In Change*, California: Barrett-Koehler Publishers, Inc, 2005.
- Green, Gary Paul and Haines, Anna, *Asset Building and Community Development*, California: Sage Publications, Inc, 2012.
- Jaya, Pajar Hatma Indra, “Trickle Down Effect: Strategi Alternatif Dalam Pengembangan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Jaya, Pajar Hatma Indra, *Pistol Otak dan Hati; Tipologi Motivasi Perusahaan Dalam Melakukan CSR, Aplikasi*, Vol XI, No 1, 2011.
- Ketzmann, John P. and McKnight, John L., *Building Communities From The Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing A Community’s Asset*, Illinois: Acta Publications, 1993.
- Maksudin, dkk, *Buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Integrasi-Interkoneksi Tematik Posdaya*, Yogyakarta, LPM UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Melia, Cisca dan Ahmad, Rival G, *Tim Panduan Fasilitator*, Jakarta, Australia Indonesia Partnership dan IDSS, 2008.
- Nuriman, Harry, *Kail Saja Tidak Cukup: Catatan Seorang Praktisi CSR*, Jakarta, AntaranPublishing, 2013.
- Pongge Goegoex, *KKN Posdaya 2014: Beginning of the End*, <http://lpmarena.com/2014/09/29/kkn-posdaya-2014-beginning-of-the-end>, diunggah 29 September 2014.
- Saptoni, Pendahuluan, dalam buku Suisyanto, dkk, *Manual Kerja Perubahan Sosial untuk Pemula*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah-IISEP-CIDA, 2006.
- Tiyanto, Dwi, dkk, *Mengubah Dari Yang Kecil (Perspektif, Konsepsi dan Metode Membangun Komunitas)*, Surakarta: Circum dan Lindu Pustaka, 2006.
- Wahab, Syahrial, “Kuliah Kerja Nyata dan Perubahan Sosial,” dalam Taufik Abdullah (ed.), *Pemuda dan Perubahan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1974.
- Yunus, Muhammad, *Bank Kaum Miskin*, Jakarta: Marjin Kiri, 2007.
- <http://www.pindul.net/2015/08/sejarah-dan-asal-usul-go-pindul.html>, diunggah 14 Januari 2016.